

Indonesia Bangkit 2008 Oleh: Mudrajad Kuncoro

Belum tuntas “masalah struktural” ditangani, para pelaku bisnis kini menghadapi ketidakpastian pasokan gas/BBM, kenaikan harga BBM, dan makin mahal nya tarif listrik. Apakah momentum 100 Tahun Kebangkitan Nasional akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi atau sebaliknya?

Konstelasi ekonomi global selama satu tahun terakhir ini cenderung berpotensi mengguncang ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Meningkatnya harga minyak dunia, yang sempat menembus US\$126 per barel, dan harga-harga komoditas pangan akan membayang-bayangi kinerja ekonomi Indonesia di tahun tikus ini. Resesi di Negeri Paman Sam dan Eropa diperkirakan akan memengaruhi Indonesia dari sisi ekspor, impor, pasar saham, dan pasar uang. Masalahnya, apakah ekonomi Indonesia cukup tangguh menghadapi gejolak pasar global yang makin “tidak bersahabat” terhadap kita? Apakah momentum 100 Tahun Kebangkitan Nasional akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi atau justru sebaliknya, menjadi awal kebangkrutan ekonomi Indonesia?

Pelaku bisnis Indonesia terancam krisis jilid ke-2. Belum tuntas “masalah struktural” ditangani, para pelaku bisnis dihadapkan pada ketidakpastian pasokan gas/BBM, kenaikan harga BBM, dan makin mahal nya tarif listrik. Dengan kondisi seperti itu, apakah dunia bisnis dan industri mampu bangkit, tumbuh, dan bersaing, serta menopang target pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor, dan pertumbuhan lapangan kerja?

Permasalahan Struktural

Harus diakui, di masa pemerintahan SBY-JK, ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi makro sudah jauh menurun dibanding di masa lalu. Angka-angka indikator makroekonomi pun boleh dikata berada dalam kondisi “aman dan terkendali”. Selama periode 2005–2007, rata-rata per tahun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%, inflasi 10%, bunga SBI 9,9%, dan kurs Rp9.343/US\$. Pasar modal pun diwarnai oleh rekor-rekor baru Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Surat Utang Negara (SUN), yang terus diminati oleh investor domestik maupun asing. Obligasi Republik Indonesia (ORI) selalu terserap oleh investor perseorangan dengan nilai yang melebihi target. Cadangan devisa melonjak secara signifikan, dari posisi akhir tahun 2006 sebesar US\$34,7 miliar, naik menjadi US\$55,1 miliar pada 7 Desember 2007.

Bagaimana dengan sektor industri? Semenjak Orde Baru hingga saat ini, perkembangan industri telah mengubah struktur perekonomian Indonesia. Antara tahun 1970-an dan tahun 2000-an, peranan sektor industri meningkat pesat meninggalkan sektor pertanian yang kontribusinya makin menurun. Hingga akhir tahun 2007, atau dalam waktu hampir empat dasawarsa, peranan sektor industri manufaktur telah mencapai sekitar 28% dari produk domestik bruto (PDB). Kendati menjadi leading sector, sektor industri manufaktur Indonesia tumbuh jauh lebih lamban sesudah krisis 1997. Sejak krisis ekonomi Asia sampai 2007, pertumbuhan sektor industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit. Perkembangan yang tersendat-sendat ini jauh berbeda dengan

masa sebelum krisis pada saat sektor industri manufaktur dapat tumbuh dengan dua digit. Selama 2004 –2007, industri hanya tumbuh 4,6%–6,4%.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) versi pemerintah SBY-JK, daftar permasalahan struktural industri Indonesia sebenarnya telah diidentifikasi. Pertama, masih sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri, yang berkisar 28%–30%, pada 1993–2002. Kedua, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe “tukang jahit” dan “tukang rakit”. Ketiga, rendahnya kualitas SDM, sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja industri. Keempat, belum terintegrasinya UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar. Kelima, kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati “monopoli”, setidaknya oligopoli. Ini terbukti dari lebih dari 50% subsektor industri memiliki indeks konsentrasi dua perusahaan (CR2) di atas 0,5 pada tahun 2002. Keenam, struktur industri Indonesia terbukti masih dangkal, dengan minimnya sektor industri menengah.

Oleh karena itu, apabila kita ingin berbicara banyak dalam pasar global, mau tidak mau, distorsi yang menghalangi fair competition harus dihilangkan. Sudah saatnya proteksi bagi industri yang tidak efisien dan “jago kandang” dihilangkan, setidaknya dikurangi porsi. Momentum liberalisasi perdagangan dunia dan disepakatinya WTO agaknya merupakan external pressure untuk meniadakan berbagai proteksi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini perlu dibarengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur, dan suprastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar global. Pengembangan usaha kecil dan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan tidak hanya berhenti pada retorika politik semata.

Agar dapat bersaing di pasar global, sudah saatnya iklim persaingan di dalam negeri dibenahi. Struktur industri Indonesia yang umumnya oligopolistik dan terkonsentrasi terbukti hanya “jago kandang”. Pada gilirannya, ini menghasilkan struktur industri yang dangkal dan rentan terhadap gejolak eksternal, yang tercermin dari rendahnya kandungan teknologi, ketergantungan yang tinggi pada barang modal dan input antara dari luar negeri, serta lemahnya keterkaitan antarindustri.

Masalah Daya Saing

Daya saing negara Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan selalu berada pada peringkat papan bawah setiap tahun. Begitu dilaporkan oleh World Competitiveness Report dalam laporan tahunannya selama tujuh tahun terakhir. Jika pada 1998 Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 49 negara yang disurvei, pada tahun ini merosot menjadi urutan ke-59 dari 60 negara.

Bagaimana daya saing industri Indonesia di pasar global? Dilihat dari indeks Revealed Comparative Advantage (RCA), ternyata tidak berubah. Indeks RCA menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas atau sekelompok komoditas

suatu negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut di dunia. Sejak 1982, keunggulan komparatif Indonesia meningkat pesat dengan pertumbuhan rata-rata 19% per tahun hingga tahun 1994. Tidak berubahnya RCA Indonesia selama 1965 –1982 besar kemungkinan karena ekspor kita masih didominasi oleh minyak dan produk pertanian yang padat sumber daya alam (agricultural and resource-based industries). Setelah 1982, sejalan dengan upaya pengembangan broad-based industry, produk ekspor nonmigas Indonesia makin beragam. Namun, beberapa studi dengan RCA menunjukkan bahwa komoditas industri manufaktur Indonesia yang meningkat pangsa pasarnya di dunia masih didominasi oleh produk berteknologi sederhana seperti karet, plastik, tekstil, kulit, kayu, dan gabus.

Kendati demikian, yang cukup memprihatinkan adalah adanya indikasi mulai melemahnya daya saing Indonesia sejak tahun 1992. Salah satu penyebab utamanya adalah masih terkonsentrasinya produk ekspor nonmigas yang tergolong hasil dari industri yang padat sumber daya alam (NRI) dan berbasis tenaga kerja yang tidak terampil (ULI).

Penyebab merosotnya daya saing sudah banyak diidentifikasi, yaitu: rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, tidak efisiennya bisnis, tingginya bahan baku yang masih diimpor dari luar negeri, meningkatnya biaya buruh, rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Tidak mengherankan, country risk Indonesia dinilai masih relatif tinggi, kendati mulai membaik tahun ini. Inilah penyebab utama mengapa investor asing masih enggan masuk ke Indonesia. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (baik oleh pemda maupun pemerintah pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja.

Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai peraturan daerah (perda) yang tidak pro bisnis, diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman.

Perlunya Road Map

Berbagai masalah ekonomi jangka menengah dan panjang yang dihadapi Indonesia membutuhkan semacam road map yang jelas: mau dibawa ke mana bangsa ini dalam 5 –20 tahun mendatang?

Saya teringat kembali pada peringatan Stephen Leeb, penulis buku *The Coming Economic Collapse: How You Can Thrive When Oil Costs \$200 a Barrel*. Pada tahun 2006, ia sudah meramal, dengan eskalasi harga migas yang tertinggi dalam sejarah manusia akan membuat ekonomi AS menghadapi ancaman krisis terbesar sejak depresi dunia

tahun 1930-an. Leeb menyarankan kita harus belajar dari berbagai krisis. Depresi besar 1930-an dan Perang Dunia II mengajarkan kesalahan pemerintah dalam memilih respons kebijakan yang tepat. Cara yang tepat untuk menghadapi penurunan kinerja ekonomi adalah dengan meningkatkan pengeluaran APBN (bukan dengan APBN berimbang) dan menciptakan likuiditas untuk menutup investasi swasta yang menurun. Tantangan terbesar pemerintah adalah salah dalam menetapkan prioritas kebijakan.

Ancaman era harga energi dan pangan yang tinggi jelas perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Imbas kenaikan harga minyak dunia, cepat atau lambat, pasti akan memengaruhi perekonomian, khususnya dunia usaha dan konsumen Indonesia. Sejak Januari sampai Oktober 2007, harga minyak tidak pernah mengalami penurunan dalam pergerakan bulanan. Sayangnya, kebijakan energi nasional, sampai saat ini, belum terarah dengan jelas. Dengan berkurangnya cadangan minyak bumi, tersedianya sumber energi yang dapat dimanfaatkan, serta munculnya kesadaran baru untuk memperbaiki masalah lingkungan, maka, mau tidak mau, Indonesia memerlukan kebijakan energi yang berlandaskan paradigma baru: kebijakan yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kenaikan harga BBM tahun 2005 terbukti membuat banyak pemain bisnis Indonesia, baik besar maupun UMKM, kelabakan dan konsumen merosot daya belinya. Biaya energi masih merupakan komponen biaya yang menentukan hajat hidup banyak perusahaan dan industri di Indonesia.

Dalam konteks inilah perlunya mengintegrasikan kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional, sehingga tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki. Road Map Industri 2010 dan Visi 2030 usulan Kadin perlu disinkronkan dan dilaksanakan sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, Grand Design Kebijakan Energi, dan Program Revitalisasi Pertanian yang telah dirumuskan pemerintah.

Hanya saja, sekarang ini dibutuhkan tidak hanya policy mix makro, tetapi koordinasi kebijakan pada lingkungan metaekonomi. Lingkungan meta ini mencakup antisipasi terhadap natural disruption, sektoral, dan daerah. Integrasi kebijakan pertanian, industri, dan energi nasional perlu dipertajam agar tercipta suatu sinergi dalam mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki, guna menjamin terwujudnya food and energy security. Koordinasi lintas sektor dan daerah amat dibutuhkan karena pola perencanaan dan implementasi pembangunan Indonesia bersifat sektoral serta melibatkan 485 kabupaten/kota serta 33 provinsi.

Sudah saatnya 100 Tahun Kebangkitan Nasional tidak hanya diperingati, tetapi juga dilakukan langkah-langkah mendasar guna membangun landasan ekonomi nasional yang tangguh. Perhatian pemerintah dalam jangka pendek agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainabilitas fiskal, dan gejolak nilai tukar rupiah. Dengan kata lain, stabilitas makroekonomi memang dibutuhkan. Kebijakan yang dikeluarkan ibaratnya sekadar obat "penurun panas", tetapi belum tuntas mengobati penyakit "kanker ganas" yang menggerogoti ekonomi Indonesia. Penyakit kronis bangsa ini, yang merupakan masalah struktural seperti merosotnya daya saing, makin maraknya

korupsi multilevel, dan masalah high cost economy, tampaknya belum sepenuhnya terjawab dengan kebijakan ini.

Semoga dalam sisa waktu yang tinggal 1,5 tahun ke depan, Presiden/Wapres, Menko, para menteri terkait, dan juga Gubernur BI yang baru menyadari ancaman krisis global dan urgensi melakukan perubahan mendasar agar ekonomi kita tidak mudah terombang-ambing dalam gelombang globalisasi.

Sumber: <http://www.wartaekonomi.com/detail.asp?aid=10862&cid=24>